

PENGEMBANGAN WILAYAH MARITIM INDONESIA
STUDI KASUS : KERJASAMA INDONESIA DENGAN CHINA
Indonesian's Maritime Development
Case Study: Indonesia with China Cooperation

Fachriza Fauzi Aldino

20120510332

Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kampus Terpadu UMY, Jalan Lingkar
Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul, D.I.Yogyakarta 22183

Email: Fachrizafauzi@gmail.com

***Abstract** – This article aims to explain about the process of Indonesian's maritime development with China in nowadays. There are 2 indicators of Indonesian's maritime cooperation. For the first indicator would be internal's factor who have supported by the Indonesian's business group and*

Indonesian's political parties as part of Indonesian's policy and the last one eksternal's factor, this factors grown as of the impact of international issues and the China's effort to be the competitor of United States and other states.

***Keywords** – Indonesia, Maritime, China, Cooperation, Policy, United State.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini peluang kerjasama antar negara meluas diberbagai isu, keterbukaan negara-negara di dunia terhadap pembangunan dan pengembangan didorong oleh keterbatasan sumber dalam negeri yang meliputi beberapa aspek khususnya kawasan negara dunia ketiga. Dalam hal ini negara berkembang merupakan mitra kerjasama strategis bagi keberlangsungan hubungan kerjasama

bagi negara-negara industri terlebih dengan ketersediaan sumber daya yang melimpah, mendorong negara maju tertarik bekerja sama guna menyelesaikan isu yang terjadi di kawasan negara berkembang baik bersifat nasional, regional dan internasional demi melancarkan kepentingan negara masing-masing dan kerjasama ini dapat berlangsung secara bilateral maupun multilateral.

Pemerintah Indonesia telah menjalin berbagai kerjasama dengan berbagai negara namun terkait pelaksanaan pengembangan wilayah maritim Indonesia, Pemerintah dan Kabinetnya memiliki pertimbangan dalam mewujudkan tujuan Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki peran penting berdasarkan latar belakang sejarah bangsa Indonesia. Pada era kerajaan Sriwijaya, Majapahit hingga kepemimpinan kolonial pemerintah Belanda, Laut nusantara tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi (jalur perdagangan laut) namun secara luas posisi laut nusantara berperan sebagai sarana komunikasi Internasional antara Singhasari dan Champa, sebagai simbol kedaulatan wilayah yang dilakukan oleh kerajaan Shri Wijaya terhadap Selat Malaka, sebagai simbol keperkasaan di laut bagi suku-suku bugis dan sebagai sarana perluasan wilayah pasifik oleh kerajaan Ternate dan Tidore (H. N. Arbaningsih 2008, 2)

Pengertian dari Maritim menurut asal katanya dari bahasa Inggris 'Maritime' yang berarti berkenaan dengan laut (lingkungan kelautan) atau berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan dan secara meluas meliputi sumber-sumber daya internal dan eksternal laut, yaitu pelayaran, perdagangan, lingkungan pantai dan pelabuhan, serta faktor strategis lainnya (H. A. Arbaningsih 2008, 29)

Luas wilayah laut Indonesia telah ditetapkan dan diatur dalam the United Nations Conventions on the Law of the Sea (UNCLOS) I dan II berdasarkan Batas Laut Teritorial, Landas Kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif (Ikawati 2012). Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia tidak didukung oleh pembangunan non fisik yang meliputi pendidikan dan pengajaran SDM (Sumber Daya Manusia) yang mampu bersaing dibidang ketenaga kerjaan selain itu tidak lepas dari

pembangunan dan pengembangan pada sektor kelautan yang mendukung lima elemen negara maritim: *Wawasan maritim, Kedaulatan Nyata di Laut, Industri Maritim* meliputi *Industri Perikanan, Industri Wisata Bahari dan Industri Pelayaran, Tata Ruang Maritim* meliputi *Pengelolaan Ruang dan Lingkungan Hidup*, kemudian *Sistem Hukum Maritim* (H. N. Arbaningsih 2008, 26-28).

Indonesia menerima respon positif terkait kemitraan kerjasama pengembangan wilayah maritim nasional, salah satu tawaran kerjasama muncul dari negara Jepang sebagai negara maju di wilayah Asia. Negara Jepang merupakan salah satu negara maritim yang memiliki peran penting dalam sejarah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data yang ada Jepang merupakan negara mitra dagang terbesar dalam hal ekspor-impor Indonesia. Ekspor Indonesia ke Jepang bernilai US\$ 23.6 milyar, sedangkan impor Indonesia dari Jepang adalah US\$ 6.5 milyar (Kedutaan Besar Jepang 2015).

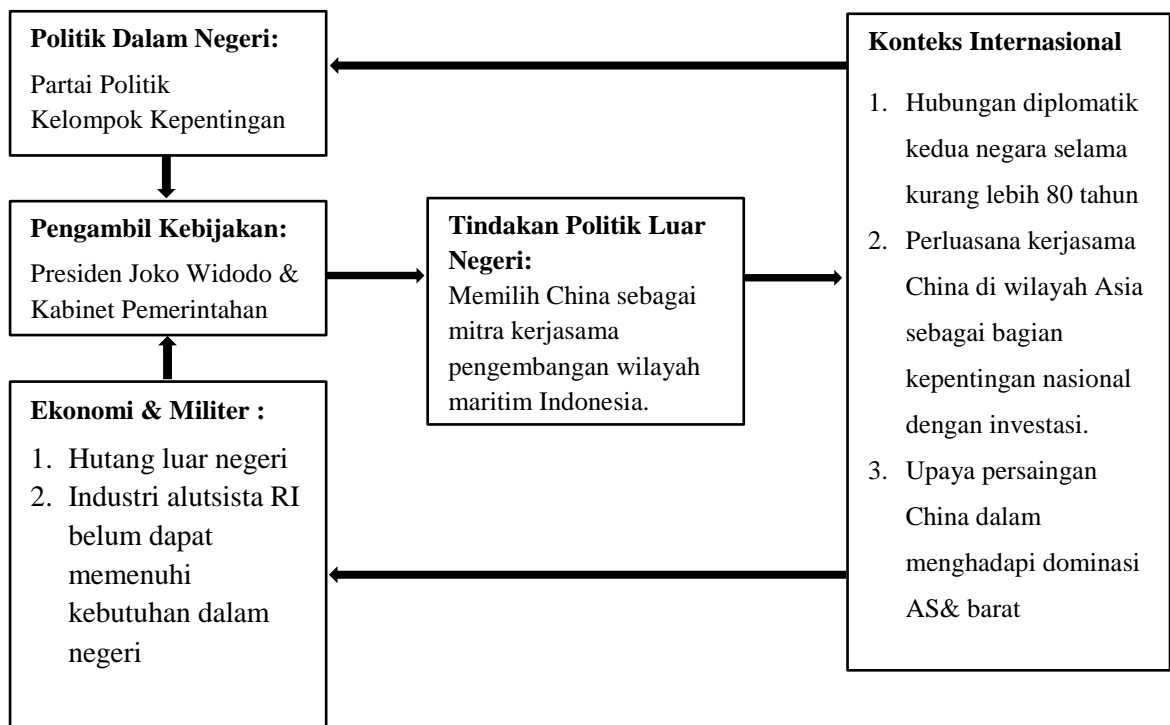
Arah kebijakan Indonesia dengan Jepang dalam kerjasama wilayah kemaritiman tidak mendapatkan respon yang baik dengan ditandainya kedekatan pemerintah Indonesia dengan China hingga penanda tangan kerjasama kedua negara. Kesepakatan kedua negara menemui titik akhir hingga menghasilkan kesepakatan Mou yang ditanda tangani oleh RI – RRC pada tanggal 26 Maret 2015 di Great Hall of The People oleh para pejabat Indonesia dan China yang disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jin Ping (Antarnews 2015).

KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam menjawab faktor-faktor yang mendorong Indonesia melakukan kemitraan kerjasama dengan China terkait pengembangan wilayah maritim Indonesia, maka penulis menggunakan Teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri oleh William D. Coplin. Pengertian teori menurut Mohtar Mas' oed adalah berupa sekumpulan generalisasi, dan karena didalam generalisasi terdapat konsep-konsep, kemudian teori dapat diartikan sebagai pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis (Mas' oed 1990, 186).

Teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri

Menurut Coplin, kebijakan luar negeri suatu negara merupakan hasil dari tiga pertimbangan yang mempengaruhi para pembuat keputusan luar negeri. Tiga pertimbangan tersebut yaitu; pertama, kondisi politik dalam negeri, kedua adalah kapabilitas ekonomi dan militer dan yang terakhir adalah konteks internasional, yaitu posisi khusus suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain (Marbun 2003).



Politik Dalam Negeri

Menurut Coplin, untuk menjelaskan peran politik dalam negeri terkait pengambilan keputusan luar negeri terdapat asumsi yang mendasar tentang perbedaan yang bersifat lintas nasional. Maka dapat dipahami pengambilan keputusan luar negeri merupakan hasil dari sebuah proses politik yang melibatkan elit politik, kelompok bisnis dan partai politik yang berperan sebagai policy influencer. Lebih jauh Coplin menambahkan, dalam sistem pengaruh kebijakan terjadi hubungan timbal-balik antara pembuat keputusan dengan policy influencer. Policy influencer merupakan sumber dukungan bagi penguatan rezim tertentu dalam suatu negara (Fathani 2012).

Kondisi Ekonomi dan Militer

Target ekonomi pemerintah tahun 2015 yang tidak tercapai di antaranya realisasi pendapatan negara Rp1.491,5 triliun (84,7% dari target di APBN) dan penerimaan pajak Rp1235,8 triliun (83% dari target) (BBC News 2015). Utang luar negeri Indonesia mengalami pertumbuhan 3,2 persen *year on year*, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan di bulan Oktober 2015 sebesar 2,5 persen (Okezone 2016).

Militer

Revitalisasi alutsista Tentara Nasional Indonesia hingga akhir 2014 anggaran modernisasi dan perawatan alutsista TNI sampai akhir tahun 2014 tercatat sebesar 99 triliun rupiah dan Kementerian Pertahanan masih membutuhkan tambahan anggaran 57 triliun rupiah. Upaya memperkuat pertahanan nasional berimplikasi terhadap perluasan kerja sama Indonesia terhadap negara-negara dari berbagai kawasan (Wartabuana 2014).

Konteks Internasional

Dalam kurun waktu kurang lebih 30 tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi China berhasil membebaskan setengah milyar penduduk dari kemiskinan (World Bank 2014). Inovasi teknologi China semakin berkembang meliputi bidang keamanan dan pertahanan militer asal China berdasarkan dugaan Amerika Serikat terhadap China yang menentang dominasi militernya dengan mengembangkan radar anti-pesawat, pesawat mata-mata canggih, rudal hebat dan peralatan perang elektronik sehingga mengancam keberadaan militer Amerika Serikat sebagai negara adidaya (Sindonews 2015).

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan metode penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan data-data sekunder berdasarkan pengumpulan data dari perpustakaan, buku-buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik dan website yang telah diolah, diseleksi dan diinterpretasikan agar dapat dipaparkan secara deskriptif serta memberi gambaran dan menjawab dari pertanyaan yang tertulis di pokok permasalahan diatas.

Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi pembahasan yang melebar, maka penulis akan memberi pembatasan waktu penelitian pada masa kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga transisi masa pemerintahan presiden Joko Widodo dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan wilayah kemaritiman Indonesia hingga pemilihan mitra kerjasama tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan menggunakan aplikasi teori pembuatan keputusan luar negeri oleh William D. Coplin, maka dapat dipahami dua faktor utama yang mempengaruhi proses kebijakan pemerintah dalam mewujudkan tujuan sebagai negara poros maritim. Faktor Internal kepentingan Partai Politik dan Kelompok Bisnis dan Faktor Eksternal berdasarkan pola hubungan diplomatik China dengan Indonesia yang cenderung meningkat dan didorong adanya persaingan pengaruh China dengan Amerika Serikat dan sekutunya.

PENGARUH PARTAI POLITIK DAN KELOMPOK BISNIS

Menurut *Miriam Budiardjo*, terdapat berbagai definisi yang menjelaskan fungsi partai politik, namun menurut definisi meliputi empat sarana: 1). sarana komunikasi politik, 2). sosialisasi politik (political socialization), 3). sarana rekrutmen politik (political recruitment), dan 4). pengatur konflik (conflict management) (Budiardjo 2000, 163-164).

Partai politik Indonesia, kelompok bisnis dan beberapa lapisan yang memiliki keterlibatan dalam proses pengambilan kebijakan negara, dalam hal ini

salah satu fungsi partai sebagai saran komunikasi politik mampu menyampaikan kepentingannya dalam proses perumusan kebijakan, didalam proses perumusan kebijakan diantaranya kelompok bisnis, partai politik, organisasi penelitian, media komunikasi serta individu masyarakat (Anderson 2006, 57-67).

Kelompok bisnis ini tidak lepas dari pengaruh penyebaran etnis Tionghoa di Indonesia memiliki arti penting tersendiri yang mengawal pembangunan dalam negeri, selain itu etnis tionghoa di Indonesia memiliki peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan politik nasional. Etnis Tionghoa, yang dulu sering disebut *Chinese Overseas* atau Tionghoa perantauan, tersebar di mana-mana. Jumlahnya kira-kira 23 juta jiwa, lebih dari 80 persen di antaranya berada di Asia Tenggara (Suryadinata 2002, 7)

Salah satu aktivis politik berketurunan Tionghoa Sofjan Wanandi adalah salah satu pengusaha berperan penting bagi ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi Indonesia, berdasarkan pada kedekatan elite politik dalam negeri. Secara dapat dikatakan bahwa Sofjan Wanandi berteman dekat dengan semua presiden RI Soekarno dan beberapa presiden lainnya, seperti Abdurahman Wahid, Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla (Sanda 2011, XVII).

KEBANGKITAN CHINA

Indonesia dibawah kepemimpinan Soeharto, mengantarkan Indonesia dengan China menghadapi situasi pembekuan hubungan diplomatik dan disibukkan dengan munculnya permasalahan dalam negeri keduanya. Selama kurang lebih 30 tahun pembekuan hubungan diplomatik kedua negara ini berakhir berdasarkan tuduhan China sebagai negara yang bertanggung jawab atas penyebaran PKI di Indonesia. Sehingga Indonesia dibawah kepemimpinan rezim Soeharto sibuk dalam mengatasi pemberantasan paham komunisme. Penutupan akses masuknya komunisme akibat dari kekhawatiran Amerika Serikat terhadap paham ideologi tersebut dikawasan Asia Tenggara, berdasarkan pada Perang Dingin oleh Amerika Serikat dan sekutu yang membawa paham Liberal Demokrasi dengan Uni Soviet dan paham komunismenya.

Upaya mewujudkan perdamaian terus dilakukan hingga penandatanganan MOU pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-China yang disaksikan oleh kedua kepala negara. Kesepakatan perdamaian yang dilakukan Indonesia dan China pada era kepemimpinan Soeharto menjadikan momentum yang baik bagi kedua negara, Indonesia bahkan menjadi negara pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan China (Kompas 2015)

Transformasi China berangsur-angsur membawa keterbukaan terhadap kerjasama dan investasi, selain dari pada itu kebangkitan China dibawah kepemimpinan Hu Jianto dalam Kongres ke-16 Partai Komunis China dan Kongres Rakyat Nasional ke-11, dirumuskan tujuan nasional jangka panjang guna mendorong kesejahteraan dan harmonis masyarakat China hingga tahun 2020, maka ditingkatkannya PDB sebesar empat kali lipat pada tahun 2000.

China memaksimalkan pembentukan citra positif dengan dilakukannya aksi nyata keikutan serta China oleh berbagai organisasi internasional dan didorong dengan wujud slogan sebagai “peaceful development” atau “pembangunan damai” sebagai strategi pemerintah dalam mendorong peningkatan ekonomi dan politik China. Kepentingan atas stabilitas kawasan menjadi salah satu tujuan utama Cina dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi saat ini (Yuliantoro 2012, 106)

Berdasarkan pertumbuhan China yang membawa China aktif diberbagai organisasi internasional, China mengembangkan hubungan bilateral dan memaksimalkan industri minyak dalam negerinya. Industri minyak China yang tergolong baru dapat bersaing dengan perusahaan minyak lainnya serta dapat bersinergi dengan memaksimalkan kerja sama negara-negara kawasan Asia Tenggara. (Andika Drajat M. 2014)

KERJASAMA INDONESIA DAN CHINA

Globalisasi merupakan fenomena bagi negara-negara di dunia dalam melakukan pembukaan hubungan diplomatik antar negara dalam pengembangan pembangunan berbagai sektor dalam negeri. Fenomena globalisasi ini berlaku bagi Indonesia dalam pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah.

Indonesia berupaya melakukan serangkaian kerjasama secara bilateral maupun multilateral diberbagai sektor terhadap negara-negara kawasan Asia, Afrika, Eropa dan Amerika, selain itu Indonesia turut aktif dalam forum regional dan internasional. Sebagai negara yang diuntungkan secara geografis, Indonesia beriklim tropis dan dilewatinya garis khatulistiwa sehingga mendukung adanya keaneka ragaman flora dan fauna.

Namun beberapa dekade pergantian pemimpin, pembangunan nasional belum secara maksimal dan merata. Hal ini disebabkan berdasarkan pada land based oriented (orientasi pembangunan darat) yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga negara Indonesia sebagai negara kepulauan belum mendapat perhatian khusus dalam pembangunan kelautan itu sendiri. Hal ini menyebabkan kecelakaan laut yang cukup banyak memakan korban berdasarkan pada ketidak layakan transportasi kapal laut yang menjadi pergerakan ekonomi masyarakat yang tidak seharusnya dioperasikan, melebihi muatan dan tidak sesuai dengan standar keselamatan yang telah ditetapkan sehingga memperparah kondisi kelautan nasional.

Upaya mewujudkan pengembangan sektor maritim serta keamanan maritim, Indonesia berupaya meluaskan haluan kerjasama dengan China ditandai dengan kedekatan hubungan kedua negara yang semakin meningkat dan sikap politik luar negeri yang ditunjukan pasca normalisasi yang terjadi antara Indonesia dengan China. Setelah melewati beberapa kemitraan kerjasama baik bilateral maupun secara multilateral hubungan Indonesia-China menunjukkan hasil yang memuaskan bagi Indonesia dan China. Abad 21 memberikan kesan tersendiri bagi China yang telah bertransformasi sebagai negara yang berperan penting terhadap segala aspek khususnya ekonomi dan pertahanan negara-negara Asia Tenggara. Peran China dalam memainkan posisi sebagai negara kawasan Asia Timur, yang memiliki kemitraan kerjasama dengan negara-negara ASEAN khususnya Indonesia.

Kemitraan kedua negara tidak lepas dari pengaruh politik luar negeri yang diterapkan Indonesia khususnya Indonesia dalam menyikapi China selain sebagai negara dengan ekonomi terkuat kedua, China tumbuh sebagai negara maritim yang mampu diaplikasikan terhadap pembangunan infrastruktur dalam negeri Indonesia berdasarkan survey yang dilakukan Joko Widodo (Tempo 2014). Kesepakatan kedua negara menemui titik akhir hingga menghasilkan kesepakatan Mou yang ditanda tangani oleh RI – RRC pada tanggal 26 Maret 2015 di Great Hall of The People oleh para pejabat Indonesia dan China yang disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jin Ping. Hasil kesepakatan kerjasama tersebut meliputi Nota kesepahaman kerjasama ekonomi antara Kemenko Perekonomian RI dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRT (Antaraneews 2015)

Kesepakatan kerjasama kedua negara meliputi beberapa hal dan diantaranya merupakan perpanjangan dari kesepakatan yang sudah berjalan;

1. Nota kesepahaman kerjasama Proyek Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung antara Kementerian BUMN dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRT,
2. Nota Kesepahaman kerjasama maritim dan SAR antara Basarnas dan Kementerian Transportasi RRT.
3. Kerjasama antara Protokol Persetujuan antara Pemerintah RRT dan RI dalam pencegahan pengenaan pajak ganda kedua negara,
4. Kerangka Kerja Sama Antariksa 2015-2020 antara Lapan dan Lembaga Antariksa RRT,
5. Nota kesepahaman kerjasama saling dukung antara Kementerian BUMN dan Bank Pembangunan China Pembangunan.
6. Nota kesepahaman antara pemerintah RRT dan RI dalam pencegahan pengenaan pajak ganda kedua negara
7. Nota kesepahaman kerjasama bidang industri dan infrastruktur antara Kementerian BUMN dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRT.

Kerjasama Indonesia-China dalam penjagaan keamanan laut dan pengembangan maritim sudah berjalan sebagai tindak lanjut kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Republik Rakyat Cina (RRC) yang berbasis pada Maritime Cooperation Committee (MCC), di Beijing pada 23 Maret 2012. (Nasional Republika 2014)

Dan upaya tindak lanjut dari hubungan kerjasama maritim yang telah disepakati kedua negara terwujud dengan adanya perjanjian baru disepakati pemerintah Indonesia dan RRT dalam bidang keamanan laut selain itu kerjasama yang terlaksana antara kedua negara antara lain; *Pelatihan Capacity Building to Conduct Training Vessel Traffic Service Operator for VTS Lombok and Sunda Strait* dan *Project of remote sensing satellite application ground stations cooperation oleh Bakorkamla dan CNSA* (Badan Keamanan Laut 2015) dan kerjasama Indonesia-China meliputi penandatanganan *Agreement of Maritime Transport between the Governments of the Member Countries of ASEAN and the Government of the People's Republic of China* (Antaraneews 2016).

KESIMPULAN

Upaya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan negara China dalam pengembangan baik meliputi sektor darat, udara dan laut sebagai kesadaran akan pembangunan wilayah kemaritiman yang masih belum dapat secara maksimal mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dalam proses terjalannya kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara melalui beberapa faktor yang ada baik dalam negeri maupun konteks internasional sesuai pemaparan aplikasi teori William D. Coplin dalam menganalisa pembuatan kebijakan luar negeri khususnya Indonesia dengan China.

Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri menjelaskan terhadap perilaku negara yang dipengaruhi oleh faktor internal meliputi pengambil kebijakan yang dapat dipahami sebagai Presiden Republik Indonesia beserta jajaran kabinetnya kemudian situasi Politik Domestik Indonesia, dan pengaruh dari Ekonomi dan Militer Indonesia khususnya maka atas akumulasi berdasarkan beberapa faktor tersebut menimbulkan

tindakan politik luar negeri yang dalam teori William D. Coplin memiliki kesinambungan terhadap Konteks Internasional.

Konteks Internasional memberikan dorongan atas sikap suatu negara dengan kawasan internasional baik dalam hubungan bilateral maupun multilateral. Konteks Internasional China sebagai negara Asia Timur yang membawa pertumbuhan ekonomi khususnya bagi era benua Asia itu sendiri. China memainkan peran sebagai negara maju dengan jumlah penduduk terbesar serta kedekatan oleh beberapa negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Arah kepentingan China yang berorientasikan dengan darat dalam beberapa dekade kepemimpinan China mulai merambah jalur laut dalam menjaga kestabilan keamanan dalam negeri dan memperkuat sektor maritim.

Kedekatan hubungan antara China dan Indonesia menimbulkan ketergantungan bagi Indonesia salah satunya bagi sektor ekonomi dalam negeri. Hal ini berdasarkan upaya Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi terhadap investasi, China sebagai negara yang memiliki ketertarikan terhadap ekspor dan investasi di berbagai negara.

Penyebaran keturunan China (Chinese Overseas) di Indonesia sendiri memiliki posisi yang kuat dalam penguasaan ekonomi dalam negeri dan memiliki akses kedekatan oleh partai sehingga posisi yang menguntungkan dalam mengawal proses kebijakan luar negeri Indonesia khususnya. Persaingan China dengan negara maju lainnya seperti eropa dan negara maju dibuktikan China dengan perluasan kerja sama oleh berbagai negara dan dari sektor pertahanan itu sendiri posisi China sebagai negara yang cukup kuat dan besaran anggaran militer negara ini dapat memberikan bantuan dan revitalisasi alutsista negara Republik Indonesia terlebih industri alutsista dalam negeri belum mampu secara maksimal memenuhi kebutuhan militer Indonesia.

Kerjasama yang terjalin kedua negara berdasarkan kepentingan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan Ekonomi, Militer dan dorongan kelompok kepentingan dan partai yang disesuaikan dengan sikap China dalam situasi dunia internasional yang membuka peluang kerjasama dan memiliki kedekatan oleh berbagai negara kawasan Asia Tenggara berdasarkan besarnya jumlah penduduk kawasan ini.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa mengapa Indonesia memilih China berdasarkan pada dua faktor utama, faktor internal hal ini dapat dianalisa berdasarkan ekonomi dan militer dalam negeri, policy influencer partai dan kelompok bisnis yang mendorong proses terjalannya kesepakatan kerjasama antar negara dalam hal ini kerjasama maritim yang telah tersepakati merupakan kerjasama keamanan penjagaan wilayah laut Indonesia dengan China National Space Administration (CNSA).

Faktor Eksternal mengacu pada persaingan China dengan dunia internasional, persaingan kekuasaan Timur dan Barat. Terlebih posisi China sebagai negara ekonomi kedua dan indikasi persaingan yang di khawatirkan oleh negara-negara barat dan sekutu. Mendorong China untuk memperluaskan peluang kerjasama dengan berbagai negara.

REFERENSI

- Anderson, James E. *Public Policy Making: An Introduction*. Boston: Houghton Mifflin Company, 2006.
- Andika Drajat M. *Strategi Dalam Ekspansi Sektor Minyak Di Asia Tenggara*. Bachelor Thesis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Antaranews. *Indonesia-Tiongkok sepakati kerja sama delapan bidang*. 26 Maret 2015. <http://www.antaranews.com/berita/487606/indonesia-tiongkok-sepakati-kerja-sama-delapan-bidang> (diakses 2015).
- Antaranews—. *indonesia-tiongkok-sepakati-kerja-sama-delapan-bidang*. 2015. MOU kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), <http://www.antaranews.com/berita/487606/indonesia-tiongkok-sepakati-kerja-sama-delapan-bidang> diakses pada 19 Mei 2016 (diakses mei 19, 2016).
- Antaranews—. *Pemerintah ratifikasi perjanjian transportasi laut negara ASEAN-China*. 2016. <http://www.antaranews.com/berita/552215/pemerintah-ratifikasi-perjanjian-transportasi-laut-negara-asean-china>.
- Arbaningsih, HM.Nasruddin Anshoriy Ch & Dr. Dri. *Negara Maritim Nusantara: Jejak Sejarah Yang Terhapus*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.
- Badan Keamanan Laut. *Technical Commitee Meeting Ke-9 Indonesia-RRT di Beijing*. 2015.

- http://bakamla.go.id/home/artikel_lengkap/774/54a86741f83ef2aec3941028d7cd9779 (diakses Mei 19, 2016).
- BBC News. "Target ekonomi 2015 tidak tercapai, Jokowi tetap yakin." 2015.
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160104_indonesia_jokowi_ekonomi (diakses Januari 20, 2016).
- Budiardjo, Miriam. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Fathani, Fahmi Zainal. *Revitalisasi Kebijakan Luar Negeri Turki Terhadap Timur Tengah Paska Indisen Kapal Navi Marmara 2010*. Bachelor Thesis, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2012.
- Ikawati, Yuni. *Tiga lapis pagar untuk malaysia*. 2012. <http://www.big.go.id/berita-surta/show/tiga-lapis-pagar-untuk-malaysia> (diakses Mei 16, 2015).
- Kedutaan Besar Jepang . *Hubungan Perekonomian Indonesia-Jepang*. 2015.
http://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html (diakses September 20, 2015).
- Kompas. *Pencairan Kembali Hubungan, Kemenangan Diplomasi Indonesia*. 2015.
<http://print.kompas.com/baca/2015/06/26/Pencairan-Kembali-Hubungan%2c-Kemenangan-Diplomasi-I> (diakses mei 20, 2016).
- Marbun, William D Coplin dan Marsedes. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*. 2. Bandung: Sinar Baru Algesindo , 2003.
- Mas'ood, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Nasional Republika. 2014.
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/10/06/nd0j8b-bakorkamla-terima-hibah-sensor-satelit-dari-cina>.
- Okezzone. "Utang luar negeri Indonesia tembus Rp 4.241 Triliun." 2016.
<http://economy.okezone.com/read/2016/01/18/20/1291120/utang-luar-negeri-indonesia-tembus-rp4-241-triliun> (diakses Januari 20, 2016).
- Sanda, Abun. *Sofjan Wanandi: Aktivis Sejati*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2011.
- Sindonews. "China dituding menentang dominasi militer Amerika." 2015.
<http://international.sindonews.com/read/1015742/42/china-dituding-menentang-dominasi-militer-amerika-1435023385> .
- Suryadinata, Leo. *Negara Dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2002.

- Tempo. *Jokowi Mempelajari Infrastruktur Maritim Cina*. 2014.
<http://nasional.tempo.co/read/news/2014/11/09/078620658/jokowi-mempelajari-infrastruktur-maritim-cina> .
- Wartabuana. 2014. <http://www.wartabuana.com/read/46374-kemajuan-alutsista-era-sby-cuma-diberi-nilai-7.html> (diakses Januari 20, 2016).
- World Bank. “China a new approach for efficient inclusive sustainable urbanization.” 2014. China a new approach for efficient inclusive sustainable urbanization, <http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2014/03/25/china-a-new-approach-for-efficient-inclusive-sustainable-urbanization> diakses pada 20 November 2015 (diakses November 20, 2015).
- Yuliantoro, N.R. *Menuju Kekuatan Utama Dunia*. Yogyakarta: Institute of International Studies, 2012.